



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2021

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG**

JL. BASUKI RAHMAD, KEL. SRIWIJAYA, KEC. GIRIMAYA,
KOTA PANGKALPINANG TELP 0717432185

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan mewujudkan Kota Pangkalpinang yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang termuat dalam Visi Kota Pangkalpinang 2018-2023, yaitu “ **Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM** ”

“ **Sejahtera Nyaman Unggul Makmur** ” Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan keseimbangan infrastruktur dasar berkelanjutan yaitu: pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan infrastruktur berkelanjutan secara seimbang, diharapkan pembangunan akan meningkatkan nilai dan fungsi dari lingkungan itu sendiri dan bukan sebaliknya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Disamping itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka pendek disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021. Adapun fungsi Renja bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah untuk memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisiensi melalui program/kegiatan yang terukur.

Di akhir kata semoga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pangkalpinang , 19 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang,



Endang Supriyadi, ST., MT.
Penata Tingkat I
NIP.197606122000031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
I. Pendahuluan.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Sistematika Penyusunan Renja Perubahan	6
II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sd Triwulan II.....	7
2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran sd Bulan juni 2021.....	7
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang	14
III. Rancangan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	16
3.1. Program dan kegiatan PD	16
IV. Penutup.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan pemulihan alam untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas. Pengelolaan lingkungan hidup melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang sebagai lembaga Institusi yang bertugas membantu Walikota Pangkalpinang dalam menentukan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup telah menetapkan Program serta Kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 disusun dengan menyesuaikan berbagai perubahan dari Rencana Kerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kota pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 – 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung program penyelenggaraan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penutupan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan dua dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam renja perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, akan memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup lebih akuntabel.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2021. Rencana Kerja Perubahan disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada dokumen RKPD Perubahan tahun 2021 dalam upaya pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perubahan nantinya dapat menjadi pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan yaitu sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2021 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020, adalah :

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018 berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeti No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
- k. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
- l. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
- m. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 2, Seri D Nomor 01);

- n. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7).
- o. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2020 tentang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 32) tgl. 6 Agustus 2021

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA).

Sistematika Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021, meliputi :

- BAB I Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2021

- BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .

- BAB IV Penutup
Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran (Sampai Dengan Bulan Juni 2021)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 3,903,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,- (0,00%). Output dari kegiatan ini adalah Dokumen RENJA.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 1,558,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,- (0,00%). Output dari kegiatan ini adalah Dokumen LAKIP SKPD.

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 9,844,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,- (0,00%). Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 4,617,819,263,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 1,814,768,903,00 (39,30%). Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan/Gaji ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 555,848,400,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 222,390,000 (40,01%). Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan/Gaji PHL Sekretariat

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 4,816,900,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,- (0%). Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Keuangan Akhir Tahun.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 2,380,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,- (0%). Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Keuangan Semesteran.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 50.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 13,000,000,00 (26%). Output dari kegiatan ini adalah jumlah SDM yang mendapat pelatihan/diklat sesuai dengan Tupoksi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 4,990,424,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 2,754,000,00 (55,19%). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan listrik kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 23,527,850,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 14,772,100,00 (62,79%). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya ATK kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 18,340,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 4,740,750,00 (25,85%). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 100.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 48,979,364,00 (48,98%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 315,600,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 58,595,494,00 (18,57%). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya listrik, telepon dan internet kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 61,734,500,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 6,210,000,00 (10,06 %). Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kerja.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 53,897,350,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 18,750,000,00 (34,79%). Output dari kegiatan ini adalah lingkungan kantor yang bersih.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 283,379,400,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 61,138,842.00 (21,57%). Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas jabatan/operasional

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 100,000,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,- (0%). Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota,terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 437,861,870,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 158,036,500,00 (36,09%). Output dari kegiatan ini adalah terdatanya Sumber Pencemaran Institusi dan Non institusi.

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota,terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 375,662,400,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 158,584,277,00 (42,21%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Kebun Raya di Wilayah Kota Pangkalpinang

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 3,363,777,109,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 1,389,718,634,00 (41,50%). Output dari kegiatan ini adalah terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Pangkalpinang

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Penataan dan Petaan PPLH berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 31,400,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 9,270,000,00 (29,52%). Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota,terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Penataan dan Petaan PPLH Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 29,010,600,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 14,644,679,00 (50,48%). Output dari kegiatan ini adalah Terkelolanya Kasus pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan Pengelolaan Sampah,terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 48,108,000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 27,762,000,00 (57,71%). Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota

Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 3,384,787,920,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp

1,295,439,760,00 (38,27%). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Volume Sampah yang tertangani

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 3,384,787,920,00 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 1,295,439,760,00 (38,27%). Output dari kegiatan ini terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antar lintas sektor dalam penanganan persampahan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Realisasi Tahun 2021 (sampai dengan Per 31 Juni 2021)

NO	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PLAFON DANA (Rp)	REALISASI	Persentase %	KET
							SEBELUM PERUBAHAN	Rp		
1	2					3	4	5	6	7
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.207.639.087	2.266.099.453	36,51	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.305.000	-	-	
	2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.903.000	-	-	
	2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.558.000	-	-	
	2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.844.000	-	-	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.180.864.563	2.037.158.903	39,32	
	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.617.819.263	1.814.768.903	39,30	
	2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	555.848.400	222.390.000	40,01	
	2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.816.900	-	-	
	2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.380.000	-	-	
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	13.000.000	26,00	
	2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	13.000.000	26,00	

	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.858.274	71.246.214	48,51	
	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.424	2.754.000	55,19	
	2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.527.850	14.772.100	62,79	
	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.340.000	4.740.750	25,85	
	2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	48.979.364	48,98	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	431.231.850	83.555.494	19,38	
	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.600.000	58.595.494	18,57	
	2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.734.500	6.210.000	10,06	
	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.897.350	18.750.000	34,79	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	383.379.400	61.138.842	15,95	
	2	11	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	283.379.400	61.138.842	21,57	
	2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	-	-	
2	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	437.861.870	158.036.500	36,09	
	2	11	03	2.01		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	437.861.870	158.036.500	36,09	
	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	437.861.870	158.036.500	36,09	
3	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.739.439.509	1.548.302.911	41,40	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	3.739.439.509	1.548.302.911	41,40	
	2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	375.662.400	158.584.277		
	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3.363.777.109	1.389.718.634		
4	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	31.400.000	9.270.000	29,52	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.400.000	9.270.000	29,52	
	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	31.400.000	9.270.000	29,52	

						Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
5	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	29.010.600	14.644.679	50,48	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	29.010.600	14.644.679	50,48	
	2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	29.010.600	146.444.679	504,80	
6	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.415.507.240	6.212.742.535	40,30	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	15.415.507.240	6.212.742.535	40,30	
	2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah Kota	48.108.000	27.762.000	57,71	
	2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	3.384.787.920	1.295.439.760	38,27	
	2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	11.982.611.320	4.889.540.775	40,81	
							25.860.858.306	10.209.096.078	39,48	

Sampai dengan Bulan Juni, realisasi penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10,209,096,078,00 (39,48%) dari total anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 25,860,858,306,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 diukur melalui beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Instansi Pemerintah Kota Bidang lingkungan Hidup. Terdapat 4 pelayanan dasar yang diukur kinerjanya melalui SPM bidang lingkungan hidup. Pelayanan-pelayanan tersebut adalah:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa ; dan
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pencapaian SPM bidang lingkungan hidup, maka sejak tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup telah mampu memenuhi target yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, kinerja pelayanan KLH dapat dilihat di Tabel di bawah ini

abel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
Kota Pangkalpinang

N o.	Indikat or	Target SPM	Tar get IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD							Realisasi Capaian							Rasio capaian tahun						
					20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	20 21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	SPM																								
1	Pelayan an Penceg ahan Pence maran air	Pemant auan Kualitas Lingkun gan	80 %	Jumlah data kualitas lingkungan berdas arkan status mutu	n/ a	n/ a	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%
				Penga wasan pelaksa naan kebijak an bidang lingkun gan hidup	n/ a	n/ a	10 0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	85 %	97 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	85 %	97 %	10 0%	97 %
				identiti kasi sumber pence maran yang berasal dari industri	n/ a	n/ a	0%	0%	0%	0%	0%	n/ a	n/ a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	n/ a	n/ a	0%	0%	0%	0%
2	Pelayan an Penceg ahan pence maran udara dari sumbe r	Pemant auan bahan perusak ozone	50 %	Jumlah Pelaku Usaha	n/ a	n/ a	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	10 0%	90 %	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	10 0%	90 %	10 0%	90 %
3	Pelayan an penyed iaan inform asi status krusa kan lahan dan atau tanah untuk produk si Biomas sa	Pengen dalian krusa kan hutan dan lahan	6 buku	Jumlah krusa kan lahan dan/ at au tanah yang telah di Bio massa	n/ a	n/ a	0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	0%	10 0%	10 0%	10 0%
4	Pelayan an tindak lanjut pengad uan masyar akat akibat adanya duga an pence maran dan/ at	Penang an kasus pengad uan masyar akat akibat pencem aran krusa kan lingkun gan	100 %	Jumlah penyel esaian kasus lingkun gan	n/ a	n/ a	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	n/ a	n/ a	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%

au perusa kan lingkun gan hidup																																									

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yaitu :

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air).
2. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Keterbatasan Sarana Prasarana pengolahan persampahan.
5. Kurangnya akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
6. Pemanasan global
7. Penguatan laboratorium lingkungan
8. Penguatan kinerja pengelolaan persampahan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dalam merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, diperlukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang akan melaksanakan 6 program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
6. Program Pengelolaan Persampahan

Dari 6 program diatas, diturunkan menjadi 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang akan mengalami penyesuaian perubahan anggaran pada tahun 2021. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021

TABEL 5.3

**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021
KOTA PANGKALPINANG**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan			
				Target Capaian Kinerja Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11	12			
URUSAN PENUNJANG														
2	1 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	5.901.155.087	6.207.639.087	306.484.000	APBD	100%	6.872.465.687	

2	1	0	2.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18.053.900	15.305.000	(2.748.900)	APBD	100%	20.395.000	
2	1	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja		3 Dokumen	1.738.000	3.903.000	2.165.000	APBD	2 Dokumen	2.350.000	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun		2 Dokumen	958.000	1.558.000	600.000	APBD	2 Dokumen	2.350.000	
2	1	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	15.357.900	9.844.000	(5.513.900)	APBD	1 Dokumen	15.695.000	
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.747.528.063	5.180.864.563	433.336.500	APBD	100%	5.207.171.157	

2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		46 Orang	4.192.328.063	4.617.819.263	425.491.200	APBD	46 Orang	4.644.799.957	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga PHL yang Tersedia		18 Orang	550.500.000	555.848.400	5.348.400	APBD	18 Orang	557.671.200	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.350.000	4.816.900	2.466.900	APBD	1 Laporan	2.350.000	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	2.350.000	2.380.000	30.000	APBD	1 Laporan	2.350.000	
2	1	0	2.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	APBD	100%	7.378.930	
2	1	0	2.	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah yang terdata/terdaftar		0 Jenis	-	-	-	APBD	14 Jenis	7.378.930	

2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	50.000.000	-	APBD	100%	70.000.000	
2	1	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi		10 Orang	50.000.000	50.000.000	-	APBD	10 Orang	60.000.000	
2	1	0	2.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi		-	-	-	-	APBD	1	10.000.000	
2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	171.858.274	146.858.274	(25.000.000)	APBD	100%	248.730.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		9 Jenis	4.990.424	4.990.424	-	APBD	5 Jenis	5.000.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia		4 Unit	-	-	-	APBD	4 Unit	21.500.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		51 Jenis	23.527.850	23.527.850	-	APBD	51 Jenis	22.230.000	

2	1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.340.000	18.340.000	-	APBD				
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	50 Orang	125.000.000	100.000.000	(25.000.000)	APBD	50 Orang	200.000.000		
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Terepenuhinya Penyediaan Jasa	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	430.634.250	431.231.850	597.600	APBD	100%	594.175.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani	582 Orang	315.600.000	315.600.000	-	APBD	582 Orang	142.000.000		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	104 unit	61.734.500	61.734.500	-	APBD	104 Unit	61.850.000		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang	53.299.750	53.897.350	597.600		2 Orang	390.325.000		
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	483.080.600	383.379.400	(99.701.200)	APBD	100%	724.615.600	

2	1	0	2.	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		0 unit	-	-	-	APBD	9 Unit	307.535.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		85 unit	283.080.600	283.379.400	298.800	APBD	169 Unit	367.080.600	
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		1 Unit	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	APBD	1 Unit	50.000.000	
URUSAN WAJIB/PILIHAN															
2	1	0			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Terpenuhinya Perencanaan Lingkungan Hidup	80%	-			APBD	80%	360.052.912	

2	1	0	2.		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Terpenuhinya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	0 Dokumen	-			APBD	1 Dokumen	182.249.800	
2	1	0	2.	0	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab./Kota		0 Dokumen	-			APBD	1 Dokumen	132.249.800	
2	1	0	2.	0	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang terpantau		0 Dokumen	-			APBD	1 Dokumen	50.000.000	
2	1	0	2.		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 Kali	-			APBD	1 Kali	177.803.112	

2	1	0	2.	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS yang dbuat (KLHS Rencana Tata Ruang)		0	-			APBD	1	177.803.112	
2	1	0	2.	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS yang dbuat (KLHS RPJPD/RPJMD)		0	-			APBD	0	-	
2	1	0	2.	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS yang dbuat (KLHS untuk KRP)		0	-			APBD	0	-	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas air danau	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	468.587.290	520.977.670	52.390.380		2	750.000.000	
				Kualitas air sungai sebagai sumber air baku		5,54						4,27			
				Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan		3		APBD				3			

2	1	0	2.		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4 Dokumen	468.587.290	520.977.670	52.390.380	APBD	4 Dokumen	750.000.000	
2	1	0	2.	0	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	Jumlah Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut		4 Jenis	468.587.290	520.977.670	52.390.380	APBD	0 Jenis	-	Penambahan pembelian Suplemen, BHP untuk Pelayanan, Alat Kebersihan, pemeliharaan Peralatan Labor (Service), Belanja Modal Mobiler, Komputer, Laptop, dan Printer
					Persentase Jumlah Usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran			71,7%					72,7%	100.000.000	
								96,5%					96,8%		

						tanah, air, udara dan laut		75				80		
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Hidup		0 Sertifikat	-	-	-		275 Sertifikat	500.000.000
2	1	0	2.	0	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tersedia		0 Dokumen	-	-	-	APBD	1 Dokumen	150.000.000
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keaneekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	21,2	3.803.664.628	4.344.675.509	541.010.881	APBD	21,3	4.919.543.721

2	1	0	2.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1 Wilayah	3.803.664.628	4.344.675.509	541.010.881	APBD	1 Wilayah	4.919.543.721	
2	1	0	2.	0	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0 Dokumen	-	-	-	APBD	1 Dokumen	83.643.000	
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Kebun Raya	Terlaksananya Pengelolaan Kebun Raya		1 Kawasan	377.728.000	375.662.400	(2.065.600)	APBD	1 Kawasan	600.000.000	
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau yang dikelola		21,2	3.425.936.628	3.969.013.109	543.076.481	APBD	21,3	4.195.900.721	Penambahan gaji PHL karena Pagu Induk hanya 10 bulan , Honor Pejabat Pengadaan, BBM,Pembangunan Taman Ketam Remangok, Taman Lampu Kampung Senyum, TPU Girimaya

2	1	0	2.	0	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati yang dikelola		0 Unit	-	-	-	APBD	1 unit	40.000.000	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3		70%	-			APBD	70%	85.455.500	
						Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)									
2	1	0	2.		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkumpulnya Data perusahaan Penghasil Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		1 Data	-			APBD	1 Data	85.455.500	
	1	5	02			Terkumpulnya Data Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perusahaan Penghasil Limbah B3		10 Perusahaan	-		APBD	10 Perusahaan	39.057.000	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Provinsi		0 Kali	-		APBD	1 Kali	46.398.500	
2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH)	0 Perusahaan	-		APBD	1 Perusahaan	56.053.442	

2	1	0	2.		Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Perusahaan	-			APBD	4 Perusahaan	56.053.442	
2	1	0	2.	0	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan		80%	-			APBD	80%	14.888.442	
2	1	0	2.	0	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pengawasan		45 Kali	-			APBD	45 Kali	41.165.000	

2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Penghargaan	31.400.000	31.400.000	-	APBD	1 Penghargaan	320.360.585	
2	1	0	2.		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia	Tersusunnya Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia	1 Dokumen	31.400.000	31.400.000	-	APBD	1 Dokumen	320.360.585	

2	1	0	2.	0	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyampaian Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		1 Laporan	31.400.000	31.400.000	-	APBD	1 Laporan	320.360.585	
2	1	1			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80%	29.010.600	29.010.600		APBD	80%	29.050.000	

2	1	1	2.		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	5 Kasus	29.010.600	29.010.600		APBD	5 Kasus	29.050.000	
2	1	1	2.	0	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang dikelola		5 Kali	29.010.600	29.010.600		APBD	5 Kali	29.050.000	
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	86,5%	15.460.837.840	15.564.415.240	103.577.400	APBD	88%	23.784.036.153	
						Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang		13,5%					12%		

2	1	1	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	86,5%	15.460.837.840	15.564.415.240	103.577.400	APBD	88%	23.784.036.153	
2	1	1	2.01	0	Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah kota		1 Laporan	48.108.000	48.108.000	-	APBD	1 Laporan	55.758.000	
2	1	1	2.01	0	Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	Jumlah volume Sampah yang tertangani		159,418 M3	3.434.302.520	3.423.987.920	(10.314.600)	APBD	166,74 M3	23.517.128.880	Penambahan Pasir Urug/timbulan,APD (sepatu Bopots,Masker),BM.Rehab Kontainer Sampah.
2	1	1	2.01	0	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		0 Kali	-	-	-	APBD	2 Kali	143.847.448	
2	1	1	2.01	0	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi		12 Kali	11.978.427.320	11.982.611.320	4.184.000	APBD	12 Kali	25.000.000	

2	1	1	2.	0	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		1	-	-	-	APBD	1	41.301.825	
	1	1	01	6				Dokumen					Dokumen		
2	1	1	2.	0	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota		0	-	-	-	APBD	1	1.000.000	
	1	1	01	7				Unit					Unit		
									25.694.655.445	26.698.118.106	1.003.462.661			37.177.018.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 disusun untuk menyesuaikan kembali program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dengan mempertimbangkan berbagai hal. Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan maksud untuk mendukung visi dan misi Walikota Pangkalpinang serta meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 serta diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja.